

BAB II

TIMOR TIMUR SEBAGAI SALAH SATU PROVINSI DI INDONESIA

Pada bab ini penulis akan membahas tentang sejarah profil Timor Timur mulai dari sejarah Timor-Timur, meliputi luas wilayah, letak geografis, agama, bahasa dan gambaran umum tentang Timor Timur. Serta membahas politik domestik Timor Timur. Penulis juga akan menjelaskan berdirinya partai-partai politik di Timor Timur dan proses berintegrasinya dengan Indonesia dan menjadi sebagai salah satu provinsi di Indonesia. Dalam bab ini pun penulis ingin menjelaskan mengenai proses perjalanan kronologi serta dinamika Timor Timur. Timor Timur memutuskan untuk bergabung menjadi salah satu bagian dari NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) pada tahun 1975.

A. Sejarah Timor Timur

Timor Timur merupakan sebuah wilayah bekas koloni portugis yang dianeksasi oleh militer Indonesia menjadi sebuah provinsi yang pernah menjadi bagian Indonesia antara 17 Juli 1976 hingga 19 Oktober 1999. Kala itu provinsi ini merupakan provinsi Indonesia yang ke-27. Timor Timur dianeksasi ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh mantan presiden Indonesia ke 2 (Soeharto) setelah dijajah selama 450 tahun oleh Portugal. Wilayah provinsi ini meliputi bagian timur pulau Timor, pulau Kambing atau Atauro, pulau Jaco dan

sebuah eksklave di Timor Barat yang dikelilingi oleh provinsi Nusa Tenggara Timur.¹

B. Gambaran Umum Timor-Timur

Pada tahun 1975 Timor Timur merupakan salah satu provinsi termuda dan menjadi provinsi ke 27 (1976-1999) di Indonesia. Timor Timur memiliki jumlah penduduk sekitar 1.040.880 jiwa. Penduduk Timor Timur merupakan campuran antara suku bangsa Melayu dan Afrika, sebagian kecil keturunan Portugis. Mayoritas penduduk Timor Timur beragama Katolik (93%), diikuti Protestan (3%), Islam (1%), dan sisanya Buddha, Hindu (1%, masing-masing 0,5%), dan aliran kepercayaan (2%). Bahasa resmi yang digunakan di Timor-Timur yaitu Bahasa Tetun dan Bahasa Portugis. Selain itu dalam konstitusi disebutkan pula bahwa Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia dijadikan bahasa kerja. Dalam praktek keseharian, masyarakat banyak menggunakan bahasa Tetun Portugis sebagai bahasa ucap.

Timor Timur atau yang sekarang lebih di kenal dengan nama Timor Leste adalah Negara yang dulunya merupakan bagian dari Indonesia dan merupakan Provinsi termuda Indonesia, Timor Timur terletak di sebelah utara Australia dan bagian timur pulau Timor, sebelah utara berbatasan dengan Selat Wetar dan Selat Ombai, sebelah timur berbatasan dengan Laut Arafuru dan kepulauan Maluku Tenggara, sebelah selatan berbatasan dengan Laut Timor dan disebelah barat berbatasan dengan Provinsi NTT dan Selat Ombai. Selain itu wilayahnya juga

¹ <http://koranmakassaronline.com/v2/17-juli-1976-timor-timur-resmi-bergabung-sebagai-provinsi-ke-27-2/> diakses pada 21 Februari 2016.

meliputi pulau Kambing atau Atauro, Jaco dan enclave Oecussi Ambeno di Timor Barat. Secara astronomis Timor Timur terletak antara 807'LS - 90 29'LS dan 124 OBT-127 OBT.

- Luas keseluruhan daerah ini adalah $\pm 14.874 \text{ km}^2$,² meliputi wilayah daratan seluas 13.670,00 km²
- Luas wilayah Ambeno 787,50 km²
- Luas wilayah pulau Atauro 140,62 km²
- Luas wilayah pulau Jaco 11,25 km²

Gambar 2.1 peta Indonesia



Source : Wikipedia gambar peta Indonesia

² <http://www.angelfire.com/space2/asnam/letak.html> diakses pada tanggal 21 Februari 2016.

Gambar 2.2 peta Timor Timur



Source : Wikipedia gambar peta Timor Timur

Kabupaten (distrik) Timor-Timur secara administratif dibagi menjadi 13 distrik:³

- Aileu
- Ainaro
- Baucau
- Bobonaro (Maliana)
- Cova-Lima (Suai)
- Dili
- Ermera

³ http://id.unionpedia.org/Timor_Timur diakses pada tanggal 21 Februari 2016.

- Lautem (Lospalos)
- Liquica
- Manatuto
- Manufahi (Same)
- Oecussi-Ambeno (Pante Makasar)
- Viqueque (Cabira-Oan)

Jumlah penduduk Timor Timur tahun 1975 setelah Portugal meninggalkan wilayah tersebut sekitar 680.000 orang. Mayoritas penduduk Timor Timur adalah dari golongan orang Timor, tetapi ada juga beberapa golongan Tionghoa dan orang Indonesia. Penyebaran penduduk di Timor Timur tidak merata, terdapat beberapa daerah yang padat penduduknya. Daerah yang berpenduduk padat yaitu, Ainaro, Dili, Baucano, dan Uqoisu. Terdapat beberapa kelompok etnis di Timor Timur dan masing-masing kelompok mempunyai bahasa sendiri. Tapi pada umumnya masyarakat Timor Timur memakai bahasa Tetum sebagai bahasa pengantar sehari-hari dan digunakan oleh sekitar 60% masyarakat Timor Timur.⁴

Timor Timur adalah daerah yang berbukit-bukit, sehingga kebanyakan penduduknya hidup jauh dari kota dan pengaruh asing juga kemajuan. Mereka berpatokan pada ladang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sebagian besar kelompok dari masyarakat Timor Timur bermata pencaharian petani dan tinggal

⁴ <http://ssbelajar.blogspot.com> diakses pada tanggal 21 Februari 2016.

di dusun-dusun, dan sebagian kecilnya hidup di pantai dan bermata pencaharian sebagai nelayan.⁵

Di dalam sektor pendidikan, selama Perang Dunia II sampai tahun 1975, beberapa penduduk Timor Timur berhasil mendapatkan dan bisa mengenyam pendidikan di sekolah kolonial yang pada saat itu jumlahnya masih terbilang sedikit. Di tahun 1960-an dan 1970-an muncul beberapa golongan elite kecil yang berpendidikan dan orang-orang dengan pendidikan, sehingga aspirasi nasional ini menjadi pemimpin di wilayah Timor Timur ketika Portugal meninggalkan Timor Timur tahun 1975.⁶

Sebelum Belanda dan Portugis memasuki wilayah Timor Timur, pulau Timor merupakan jaringan dagang yang berpusat di Jawa Timur, dan kemudian Celebes (Sulawesi), dan jaringan ini merupakan jaringan yang terikat dengan jaringan komersil di Cina dan India. Pulau timor di gambarkan sebagai pulau yang terdiri dari pegunungan yang dihiasi dengan pepohonan cendana putih dan merupakan satu-satunya hasil bumi daerah tersebut.

Pada masa tahun 1974, merebaknya dominasi komunis di Portugal membuat Portugal gagal dalam melakukan proses dekolonisasi, dan lahir sebuah gerakan angkatan bersenjata yang bernama MFA (*Movimento das Forças Armadas*) yang merupakan gabungan dari tentara-tentara yang merasa tidak puas dengan penderitaan yang dialami selama dinas kemiliteran di Afrika, yang akhirnya memaksa para politisi untuk melakukan suatu perubahan radikal dalam

⁵ Hastutining Dyah Wijayatmi, *Hubungan Bilateral RI-Timor Timur Pasca Kemerdekaan Timor Timur*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2004 Hal.28.

⁶ *Ibid.*, hal.28.

sistem politik di Portugal yang lebih manusiawi menurut kehendak kelompok kiri yang pada saat itu sedang menguasai perkancahan politik dalam negeri Portugal. Setelah semua pemerintahan Portugal diambil alih oleh MFA, Portugal mulai membuka peluang kepada wilayah jajahannya dalam hal ini termasuk Timor Timur untuk memulai proses dekolonisasi.⁷

C. Politik Domestik di Timor-Timor

Setelah mendengar adanya proses dekolonisasi yang ingin diberikan oleh Portugal, pada awal bulan Mei 1974 masyarakat di Timor Timur mulai membentuk sebuah partai-partai politik, partai-partai politik yang berdiri di Timor Timur ini pun memiliki kepentingan dan orientasi politik yang berbeda-beda. Berikut beberapa penjelasan seputar beberapa partai politik yang berdiri di Timor Timur dan yang cukup berpengaruh pada saat itu, yaitu:

1. *União Democrática Timorese* disingkat UDT (Uni Demokratik Timor). Partai ini berdiri tanggal 11 Mei 1974 dan diketuai oleh Francisco Xavier Lopes da Cruz. UDT merupakan salah satu partai yang memiliki tujuan agar Timor Timur tetap berada di bawah perlindungan Portugal dengan ketentuan dapat berdiri sendiri jika sudah mampu mandiri beberapa tahun kemudian tanpa bantuan maupun perlindungan dari Portugal;
2. *Associação Sosial Democrática Timorese* disingkat ASDT (Asosiasi Sosial Demokratik Orang Timor). Partai ini berdiri pada tanggal 20 Mei

⁷ Basilio Dias Araujo, *Timor Timur Gagalnya Sebuah Diplomasi: Suatu Analisa dan Kritik dari Seorang Pelaku Sejarah*. Depok: Indie Publishing, 2014 hal.8.

1974, partai ini memiliki beberapa tokoh seperti Francisco Xavier do Amaral, Nicolao Lobato, dan Jose Ramos Horta. Berangkat dari awalan yang tadinya ASDT ingin bergabung ke Indonesia, namun pada perkembangannya partai ASDT pun berubah haluan dan berubah menjadi berhaluan Komunis Maoist setelah kembalinya beberapa mahasiswa Timor Timur dari Lisabon yang berhaluan Komunis. Oleh karena itu, ASDT kemudian merubah namanya menjadi *Frente Revolucionária Timor Leste Independente* disingkat FRETILIN (*Front Revolusioner Timor Timur Merdeka*). Kelompok politik yang memimpin partai ini berhaluan kiri garis keras sehingga sangat menginginkan agar Timor Timur dapat segera merdeka secepatnya.

3. Associação Popular Democrática de Timor disingkat APODETI (Perhimpunan Demokrasi Rakyat Timor). Partai ini didirikan oleh tokoh-tokoh pribumi yang melakukan pemberontakan melawan Portugis di Lospalos pada tahun 1945-1949 dan makar di Viqueque dengan para tokoh-tokoh terkemuka diantaranya seperti Arnaldo dos Reis Araújo, José Osório Soares, dan Guilherme Maria Gonçalves. Partai APODETI berdiri pada tanggal 27 Mei 1974, Partai politik ini bertujuan untuk menyatakan kemerdekaannya bersama Indonesia melalui Integrasi dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. *Klibur Oan Timur Aswain* disingkat KOTA (Persatuan Pejuang Timor), partai ini memiliki misi yang bertujuan untuk memperjuangkan suatu pemerintahan yang berbentuk kerajaan atau seperti monarki.

5. Tralbalhista didirikan pada bulan Oktober 1974 dan diketuai oleh A. Abrão dan Domingos Pareira. Partai Tralbalhista ini adalah Partai Buruh yang ingin berasosiasi dengan Australia yang pada masa itu dikuasai oleh Partai Buruh.⁸

Keadaan politik di Timor Timur menjadi semakin panas setelah banyaknya partai politik yang muncul dan membawa serta memperjuangkan tujuan partainya masing-masing. Dalam hal ini Fretilin merupakan partai yang paling keras dan tidak segan-segan untuk membantai lawan politiknya yang dianggap menghalangi jalannya untuk ketercapaian tujuan politiknya, sehingga banyak dari lawan politiknya yang lari ke NTT dan luar negeri. Pada tanggal 28 November 1975 Fretilin memproklamasikan kemerdekaan Timor-Timur dan berdirinya sebuah Republik Demokrasi Timor Timur.⁹

Dua hari setelahnya, tepatnya tanggal 30 November 1975 empat partai politik lainnya yaitu Apodeti, UDT, KOTA dan Tralbalhista memproklamirkan kemerdekaannya dengan cara berintegrasi dengan Indonesia melalui Deklarasi Balibo.¹⁰ Setelah deklarasi kemerdekaan melalui integrasi dengan Indonesia oleh keempat partai tersebut dan setelah melalui proses legislasi, Timor Timur kemudian berintegrasi secara resmi dengan Indonesia yang di kukuhkan dalam

⁸ Basilio Dias Araujo. Ibid., hal.12-14.

⁹ Hendro Subroto dalam Basilio Dias Araujo Ibid., hal 31.

¹⁰ East Timor truth commission finds U.S. "political and military support were fundamental to the Indonesian invasion and occupation" The National Security Archive, 24 January 2006. Op.cit.,

Undang-Undang No. 7 tahun 1976, dan disahkan melalui TAP MPR No. VI/1978.¹¹

D. Proses Bergabungnya Timor Timur Ke Dalam NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia)

Selama kurang lebih 300 tahun, rakyat Timor timur berada dalam kungkungan pemerintahan penjajahan portugal. Meski saudara-saurada yang berada di Timor Barat sudah memperoleh kemerdekaan dan telah melaksanakan pembangunan sejak 1945. Menurut Hendro subroto menyatakan bahwa *“perubahan di Timor Timur mulai terjadi di Timor timur setelah terjadi kudeta militer Portugal pada April 1974, yang dikenal sebagai Revulucao dos Cravos atau Revolusi Bunga.”*¹²

Kudeta telah membawa Jendral Antonio de Spinola ke tampuk kekuasaan sebagai Presiden Portugal. Penguas varu Portugal itu memperkenalkan kehidupan politik yang lebih demokratis di Portugal. Perubahan itu memberikan harapan bagi perubahan politik di koloni-koloni Portugis, termasuk di Timor Timur yang merupakan salah satu koloni Portugal pada saat itu. Pemerintahan portugal memberikan kesempatan kepada penduduk Timor Timur membantu partai politik sejak 1974. Oleh karena itu, mulai tahun 1974 mulai terbentuk beberapa organisasi politik di Timor Timur.

Sementara itu, pemerintahan Portugal pun sebenarnya sudah merancang dekolonisasi (kemerdekaan) bagi Timor Timur. Hanya yang jadi masalah

¹¹ Basilio Dias Araujo, *Op.Cit.*, hal.33.

¹² Hendro subroto, *Saksi Mata Perjuangan Integrasi Timor Timur*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta 1997, hal.5.

bagaimanakah Bentuk kemerdekaan Timor Timur tersebut. **Apakah akan bergabung dengan Indonesia? Menjadi negara yang berdiri sendiri? Atau bergabung dengan Portugis?** Untuk maksud tersebut pada 17 Oktober 1974 di Jakarta dilangsungkan pembicaraan antara menteri Seberang Lautan Portugal Dr. Antonio de Almeida Santos dengan pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Menteri Luar Negeri Adam Malik. Di lain kesempatan, pada tanggal 31 Agustus 1974 sebelumnya ketua Partai Apodeti menyatakan Bahwa “*partainya telah mengusulkan agar Timor Timur menjadi provinsi bagian dari indonesia*”.¹³

Pemerintahan Indonesia sangat mendukung maksud Pemerintahan Portugal untuk mengadakan dekolonisasi di Timor Tmur dan maksud Ketua Partai Apodeti untuk memilih bergabung dengan Indonesia. Asalkan proses dekolonisasi itu tidak menimbulkan instabilitas di wilayah Indonesia. Presiden Soeharto menanggapi maksud dekolonisasi Timor Timur itu dengan menyatakan tiga sikap dasar pamerintah, yaitu:¹⁴

- Tidak mempunyai ambisi teritorial.
- Menghormati hak rakyat Timor Timur untuk menentukan nasibnya sendiri.
- Apabila rakyat Timor Timur memilih bergabung dengan wilayah Indonesia, tidak mungkin berbentuk negara akan tetapi sebagai bagian dari wilayah NKRI.

Sebagai kelanjutan dari pertemuan antara Menteri Seberang Lautan Portugal dengan Menlu Indonesia Di Jakarta, dan berlanjut pada 9 Maret 1975

¹³ Hendro Subroto, *Ibid.*, hal.21.

¹⁴ Nana Supriyatna, *Sejarah Nasional Indonesia dan Umum*. Grafindo Media Pratama, 1999, hal.43.

diadakan pertemuan lanjutan di London. Dalam pertemuan tersebut, Pemerintah Portugal masih beranggapan bahwa apabila rakyat Timor Timur memilih untuk bergabung dengan Indonesia hal ini merupakan hal yang masuk akal. Pada 5 November 1975, pemerintahan Portugal menandatangani dokumen memorandum of understanding, yang intinya bahwa:¹⁵

- Untuk pertama kalinya Indonesia mengerti secara resmi dari Portugal.
- Portugal mengakui semua pihak yang ada di Timor Timur.
- Akan dilanjutkan dengan kontrak-kontrak tetap antara RI dengan Portugal.

Ketika perundingan menentukan status Timor Timur sedang berlangsung, ketegangan menentukan status Timor Timur terjadi, ketegangan antara berbagai kelompok yang berbeda di dalam masyarakat Timor Timur sangat dirasakan dari berbagai para kelompok partai, ketegangan antara berbagai kelompok yang berbeda di dalam masyarakat Timor Timur semakin memuncak. Pada tahap awal, UDT dan Fretilin berkoalisi untuk melawan Apodeti yang ingin bergabung dengan Indonesia. Namun keja sama tersebut hanya berlangsung beberapa bulan saja, karena aksi UDT dibalas oleh Fretilin seminggu kemudian pada 11 Agustus 1975. Pertikaian bersenjata antara kelompok yang berbeda itu tidak dapat dihindari. Akibatnya perang saudara terjadi di Timor Timur, dimulai di kota Dili sejak Agustus 1975.

Fretilin berhasil didesak ke luar oleh lawan politiknya dari kota Dili. Portugal yang seharusnya bertanggung jawab terhadap koloninya, membiarkan koloninya tanpa pemerintahan yang jelas sejak Gubernur portugis di Timor Timur

¹⁵ Nana Supriyatna, *Ibid.*, hal.44.

melarikan diri dari Dili ke pulau Atauro atau Pulau Kambing. Para penduduk dibiarkan terjebak dalam perang saudara, dan ribuan orang menjadi korban atau terpaksa melakukan pengungsian. Fretilin yang tersingkir dari Dili kemudian mendapatkan bantuan persenjataan dari para pendukungnya di dalam pemerintahan kolonial dan tentara Portugis. Perang baru mulai berkecamuk, yang dengan mudah dimenangkan oleh kelompok Fretilin. Dili kembali diduduki Fretilin. Jumlah korban jiwa dan penduduk yang terpaksa harus mengungsi akibat dari perang saudara itu semakin banyak. Beribu-ribu penduduk Timor Timur, termasuk anak-anak dan orang tua membanjiri daerah perbatasan dengan Indonesia di Timor bagian Barat.

Pada tanggal 28 November 1975 Fretilin memproklamasikan kemerdekaan Timor Timur dan berdirinya sebuah Republik Demokrasi Timor Timur di koloni Portugis tersebut. Namun, proklamasi itu tidak mendapatkan dukungan baik dari kelompok lain di dalam masyarakat Timor Timur maupun dari dunia internasional. Australia yang sangat diharapkan memberi dukungan kepada Fretilin, ternyata tidak melakukan hal tersebut. Kelompok masyarakat Timor Timur yang terdiri dari UDT, Apodeti, KOTA, dalam waktu bersamaan Trabalhista menyampaikan Proklamasi tandingan di balibo pada 30 November 1975. Pernyataan yang kemudian dikenal sebagai “Deklarasi Balibo” yang menyatakan keinginan Timor Timur untuk berintegrasi dengan Republik Indonesia.

Perkembangan Timor Timur dan situasi politik Internasional pada perang dingin waktu itu telah menyeret Indonesia secara langsung ke dalam pertikaian

antara orang Timor Timur sendiri. Padahal, Menlu Indonesia Adam Malik pernah menyatakan bahwa Indonesia tidak akan melakukan invasi ke wilayah Timor Timur yang menjadi koloni portugis itu. Kekalahan Amerika Serikat dari tentara Komunis di medan perang Vietnam dan kejatuhan Kamboja serta Laos ke tangan pemerintah komunis pada 1975, sangat merisaukan blok barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Perluasan pengaruh Fretilin yang berhaluan kiri di Timor Timur menimbulkan kecemasan blok barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan Australia terhadap kemungkinan perluasan kekuatan komunis di Asia Tenggara dan Pasifik. Hal ini telah mendorong munculnya dukungan Barat bagi keterlibatan langsung Indonesia di Timor Timur.

Pada bulan Desember, Menteri Luar Negeri Indonesia, Adam Malik, seperti yang dikutip dalam kantor berita resmi Indonesia 'Antara' mengatakan, bahwa rakyat Timor hanya memiliki dua pilihan: "*tetap di bawah Portugis atau bergabung dengan Indonesia.*" Kemudian ia mengatakan, bahwa pilihan dengan Portugal tidak mungkin karena pilihan itu "*selain menambah beban Portugal, juga akan merupakan sebuah bentuk baru kolonialisme*"; dan menyatakan, bahwa kemerdekaan akan "*tidak realistis*" karena "*keterbelakangan dan kelemahan ekonomi penduduknya*".¹⁶ Penasihat utama Soeharto, Harry Tjan, memastikan keputusan ini kepada Pemerintah Australia. Pada bulan Februari 1975 ia memberi tahu kepada Kedutaan Besar Australia bahwa:

"Pemerintah Indonesia sudah membuat suatu keputusan bahwa, cepat atau lambat, Timor Portugis harus menjadi bagian dari

¹⁶ Catatan Resmi Sidang Umum, dikutip dalam Departemen Politik PBB, *Report on Decolonisation* dikutip dalam hal.14, 48.

Indonesia. Ini merupakan keputusan bulat oleh semua tokoh terkemuka Indonesia yang terlibat, termasuk Presiden. Yang masih perlu diputuskan adalah kapan, dan bagaimana, hal ini harus diwujudkan. Seperti yang ia katakan, ini tidak akan terjadi dalam waktu dekat. Tapi akan terjadi. Pemerintah Indonesia akan terlebih dahulu mencoba segala cara yang memungkinkan sebelum berpaling ke solusi militer. Ia mengatakan bahwa ini adalah 'tindakan terakhir'".¹⁷

Duta Besar Australia untuk Indonesia, Richard Woolcott, menyebutkan kembali hal ini dalam sebuah analisis rahasia penting mengenai persoalan ini, yang ditulis pada bulan Januari 1976 untuk Perdana Menteri Australia yang baru, Malcolm Fraser. Ia menuliskan:

"Indonesia tidak akan dihalangi untuk mencapai tujuan fundamental kebijakan (penggabungan) ini. Indonesia sudah berketetapan dengan sikap ini secara konsisten, sejak beberapa bulan sebelum saya datang menjabat pos ini bulan Maret lalu".¹⁸

Ini merupakan keputusan yang amat menentukan. Keputusan ini bertolak belakang dengan komitmen publik Pemerintah Soeharto untuk menghargai keinginan bebas rakyat Timor. Keputusan itu juga menempatkan Indonesia pada jalur yang akan bertabrakan dengan dua partai utama Timor Timur, yaitu UDT dan Fretilin, yang keduanya menyuarakan kemerdekaan, dan memberi sebuah tantangan diplomatik yang besar bagi komunitas internasional.

Pada akhir bulan Agustus 1975, Indonesia memperkeras posisinya dan memutuskan untuk melancarkan intervensi militer guna mendapatkan integrasi.

¹⁷ Dokumen 95, Jakarta, 24 Februari 1975, dalam Wendy Way (ed.), DFAT, hal.198.

¹⁸ Richard Woolcott, *The Hot Seat: Reflections on Diplomacy from Stalin's Death to the Bali Bombings*, Harper Collins Publishers, Sydney, 2003, hal.306.

Hal ini terjadi setelah keberhasilan-keberhasilan Fretilin dalam perang saudara, dan sinyal samar-samar oleh Menteri Koordinasi Antar-Wilayah Portugis, Dr António de Almeida Santos, bahwa Portugal kemungkinan akan menyerahkan kekuasaan kepada Fretilin. Pada pertemuan tanggal 5 September, Presiden Soeharto dan Jenderal Moerdani menyelidiki tujuh kemungkinan mulai dari sebuah undangan kepada Indonesia dari Portugal untuk langsung turun tangan, sampai pada keterlibatan PBB, dimana Indonesia akan berpartisipasi.

Presiden Soeharto mencoret semua opsi kecuali rencana Opsus yang ia sebut sebagai “cara klasik”. Di bawah komando Jenderal Moerdani, rencana Opsus akan mengerahkan “sukarelawan” yang dipersenjatai dengan baik, untuk menyokong pasukan UDT dan pasukan Timor anti-Fretilin lain, dalam usahanya untuk mencegah penguasaan Timor sepenuhnya oleh Fretilin.¹⁹ Akan tetapi, Indonesia menjelaskan intervensi militernya kepada PBB dari segi kewajibannya untuk menjunjung tinggi hak Timor Timur atas penentuan nasib sendiri.

Dalam sebuah pernyataan kepada Dewan Keamanan pada tanggal 15 Desember 1975, perwakilan Indonesia Anwar Sani menyatakan bahwa Indonesia tidak memiliki klaim atas wilayah itu, bahwa Timor Timur berada dalam keadaan anarki, dan bahwa Indonesia turun tangan atas permintaan partai-partai politik yang mewakili sebagian besar rakyat “untuk mengembalikan situasi damai kepada

¹⁹ Dokumen 217, Jakarta, 6 September 1975, dalam Wendy Way (Ed.), DFAT, hal.391-392.

Wilayah itu agar rakyat dapat menjalankan hak atas penentuan nasib sendiri dengan bebas dan secara demokratis”.²⁰

Konflik bersenjata semakin merebak meluas. Keadaan di dalam medan pertempuran mulai berubah pada akhir 1975, kota Dili berhasil diduduki kelompok pendukung integrasi yang mendapat bantuan militer dari Indonesia melalui operasi seroja. Pada kesempatan yang sama, masyarakat Oekussin yang terletak ditengah-tengah wilayah Republik Indonesia menandatangani naskah pernyataan berintegrasi dengan Indonesia. Para pendukung Fretilin terdesak ke daerah pinggiran dan ke daerah-daerah pegunungan yang terpencil, melanjutkan perjuangan menentang integrasi Timor Timur dengan Indonesia.

Pertikaian politik dan militer ini menimbulkan korban jiwa, harta, serta kekacauan berkepanjangan di dalam masyarakat Timor Timur. Beban yang harus ditanggung oleh pihak Indonesia juga dinilai sangat besar, termasuk adanya korban anggota pasukan Indonesia yang cukup besar. Disamping itu, pertempuran yang terjadi telah menimbulkan korban jiwa warga negara asing, khususnya Australia. Hal ini kemudian menjadi kontroversi di dunia internasional, yang menimbulkan protes, tekanan, dan tuntutan dari pihak internasional terhadap tanggung jawab pemerintah Indonesia. Kekerasan politik dan militer yang terjadi di masyarakat mendorong terjadinya pengungsian ke berbagai tempat di Indonesia dan ke luar negeri.

²⁰ Krieger, *Secretariat to the Special Committee on Decolonisation, Working Paper on Timor* hal. 47-49.

Pernyataan integrasi Timor Timur yang telah disampaikan sebelumnya, diulang kembali oleh para pendukungnya di Kupang Nusa Tenggara Timur pada 12 Desember 1975. Sebagai langkah berikutnya, kelompok pendukung integrasi yang terdiri dari Arnaldo dos Reis Araujo yang mewakili Apodeti, Fransisco Xavier Lopez da Cruz yang mewakili UDT, Thomas Diaz Xemenes yang mewakili KOTA dan Domingus C. Pareira yang mewakili Trabalishta sepakat untuk membentuk Pemerintahan Sementara Timor Timur (PSTT). Pemerintahan sementara ini dibentuk pada 17 Desember 1975 di bawah pimpinan oleh Arnaldo dos Reis Araujo.

Setelah itu, sebuah lembaga legislatif juga dibentuk. Pada 1976, para anggota DPRD Timor Timur secara resmi menerima petisi Integrasi Timor Timur dengan Republik Indonesia dari masyarakat Timor Timur pro integrasi. Petisi itu berisi desakan kepada pemerintah untuk menerima Timor Timur sebagai wilayah yang menjadi satu dengan Republik Indonesia tanpa proses jajak pendapat.

Integrasi Timor Timur ke dalam wilayah Republik Indonesia diajukan secara resmi pada 29 juni 1976. Sebuah rancangan undang-undang kemudian diajukan kepada DPR RI. Pada tanggal 17 Juli tahun 1976 Presiden Soeharto menandatangani undang-undang nomor 7 tahun 1976 tentang pengintegrasian Timor Timur ke Indonesia dan secara resmi menjadi sebuah provinsi dari Republik Indonesia setelah undang-undang nomor 7 Tahun 1976 disahkan oleh

DPR. Kemudian ketentuan ini diperkuat Oleh MPR melalui Ketetapan No. VI/MPR/1978 tanggal 1978.²¹

E. Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik Timor Timur Ketika Bergabung Dengan Indonesia

Setelah Timor Timur masuk ke dalam wilayah Indonesia dan menjadi provinsi ke 27, keadaan sosial, politik dan ekonomi rakyat Timor Timur mengalami perubahan. Dalam bidang sosial, pemerintah Indonesia berusaha membentuk rakyat Timor Timur menjadi orang Indonesia, yang diwujudkan dalam berbagai hal, seperti adanya penataran P4 yang bertujuan agar rakyat Timor Timur memahami Dasar Negara Indonesia serta nilai-nilai yang terkandung didalamnya.

Selain itu bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional yang wajib untuk dipelajari dan digunakan dalam perbincangan maupun percakapan sehari-hari.²² Struktur sosial masyarakat Timor Timur juga mengalami perubahan. Saat Timor Timur menjadi jajahan Portugis, status sosial tertinggi berada pada para pemuka agama, yaitu Paus, dan setelah Timor Timur masuk kedalam Indonesia, status social tertinggi berubah, bukan pemuka agama, melainkan pejabat pemerintah.

Pemerintah Indonesia menginginkan ketercapaian proses integrasi secara penuh. Setelah melakukan serangkaian pembangunan fisik dan sumber daya manusia, pemerintah telah berhasil mewujudkan integrasi wilayah, namun bukan

²¹ Chega (*Laporan Komisi Penerimaan Kebenaran dan Rekonsiliasi (CAVR) di Timor Leste*), Jakarta, PT Gramedia, 2010, hlm.239.

²² Hendracaroko Marpaung. *Timor Timur Menyerang Indonesia*. Yogyakarta: Galangpress. 2009. hlm.66.

integrasi bangsa. Program yang diberlakukan oleh pemerintah di Timor Timur secara perlahan mengikis identitas asli rakyat Timor Timur. Seperti diberlakukannya kewajiban menggunakan bahasa Indonesia yang kemudian menyebabkan bahasa asli rakyat Timor Timur, yaitu bahasa Tetun perlahan tidak mendapat tempat didalam pergaulan rakyat Timor Timur. Selain itu pemerintah juga melakukan indoktrinasi pancasila bagi rakyat Timor Timur yang menyebabkan ideologi rakyat yang berdasarkan keagamaan yang selama ini dianut tidak lagi memiliki ruang.²³

Dibidang politik, wewenang politik di Timor Timur berada ditangan pemerintah Indonesia. Pemerintah merombak segala birokrasi lama yang dulu pernah digunakan di Timor Timur. Struktur pemerintahan daerah peninggalan Portugis diubah dan disamakan dengan pemerintahan di Indonesia. seperti *Concelho* diubah menjadi kabupaten; *postos administrativos* menjadi kecamatan; *Administradov* menjadi bupati; *Cheve De Posto* menjadi camat; *Sucos* menjadi desa; dan *Pavoacao* menjadi Rukun Tetangga.²⁴

Selain itu sistem birokrasi baru yang diterapkan di Timor Timur, yaitu pejabat pemerintahan berasal dari kalangan politisi. Hal ini jelas berbeda dengan Timor Timur pada saat sebelum bergabung dan pada saat penjajahan Portugis yang menempatkan Paus sebagai pemegang kewenangan tertinggi di wilayah Timor Timur. Dengan dirubahnya kebijakan ini, mengakibatkan pejabat pemerintah yang cenderung tidak dipatuhi dan tidak disegani oleh rakyat Timor

²³ Hendracaroko Marpaung. Ibid., hal.66.

²⁴ Avelio M. Coelho, *Dua Kali Merdeka, Esei Sejarah Politik Timor Leste*, Yogyakarta: Djaman Baroe, 2012, hlm.51.

Timor. Rakyat Timor Timur masih terbiasa dengan kepemimpinan seorang Paus, karena pada umumnya masyarakat di Timor Timur mayoritas beragama nasrani, dan perkataan Paus selalu menjadi pedoman bagi kehidupan mereka.²⁵

Permasalahan Timor Timur masih menjadi sengketa bagi Indonesia dan PBB. PBB belum mengakui status integrasi Timor Timur kedalam wilayah Indonesia. Bidang perekonomian di Timor Timur juga mengalami perubahan, seperti diberlakukannya mata uang Rupiah dalam perdagangan di Timor Timur, selain itu dilakukannya nasionalisasi terhadap gedung-gedung serta peninggalan perniagaan Portugis dan dimanfaatkan untuk menggerakkan perekonomian rakyat Timor Timur.²⁶

Semenjak wilayah Timor Timur berintegrasi dengan Indonesia, banyak pedagang dari Sumatra dan Jawa datang untuk berdagang di Timor Timur.²⁷ Bahan makanan di Timor Timur sebagian besar berasal dari Nusa Tenggara Timur, hal ini dikarenakan iklim Timor Timur yang sangat panas sehingga tidak semua bahan makanan dapat diproduksi sendiri oleh masyarakatnya. Pertumbuhan ekonomi di Timor Timur perlahan dapat berkembang dengan maraknya perdagangan yang dilakukan oleh pedagang dari luar Timor Timur. Namun pertumbuhan ekonomi semakin lama makin menjadi ajang monopoli

²⁵ Hendracaroko Marpaung, *Op.Cit.*, hlm.50.

²⁶ Avelio M. Coelho, 2012. *Op.Cit.*, hlm.52.

²⁷ Lela E. Madjiah, *Timor Timur Perginya Si Anak Hilang*, Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2002, hlm.105.

perdagangan. Perekonomian dikuasa oleh orang-orang luar Timor Timur dan rakyat Timor Timur justru hanya menjadi konsumen.²⁸

Perekonomian di Timor Timur diklasifikasikan sebagai perekonomian dengan pendapatan menengah kebawah oleh Bank Dunia. Timor Timur berada di peringkat 158 dengan tingkat perkembangan manusia 20% penduduk menganggur dan 52,9% hidup dengan pendapatan US \$ 1,25 per hari. Tiga Bank asing yang memiliki cabang di Dili adalah ANZ National Bank, Banco Nacional Ultramarino dan Bank Mandiri.²⁹

F. Invasi Militer Indonesia Ke Timor Timur

Pada tahun 1975, ketika terjadi Revolusi Bunga di Portugal dan Gubernur terakhir Portugal di Timor Timur, Lemos Pires, tidak mendapatkan jawaban dari Pemerintah Pusat di Portugal untuk mengirimkan bala bantuan ke Timor Timur yang sedang terjadi perang saudara, maka Lemos Pires memerintahkan untuk menarik tentara Portugis yang sedang bertahan di Timor Timur untuk mengevakuasi ke Pulau Kambing atau dikenal dengan Pulau Atauro. Setelah itu FRETILIN menurunkan bendera Portugal dan mendeklarasikan Timor Timur sebagai Republik Demokratik Timor Leste pada tanggal 28 November 1975. Menurut suatu laporan resmi dari PBB, selama berkuasa selama 3 bulan ketika terjadi kevakuman pemerintahan di Timor Timur antara bulan September, Oktober dan November, Fretilin melakukan pembantaian terhadap sekitar 60.000

²⁸ Lela E. Madjiah, 2002. Ibid.,

²⁹ CM. Rien Kuntari, *Timor Timur Satu Menit Terakhir – Catatan Seorang Wartawan*, Bandung: Mizan, 2008, hlm.105.

penduduk sipil (sebagian besarnya adalah pendukung faksi integrasi dengan Indonesia).

Dalam sebuah wawancara pada tanggal 5 April 1977 dengan Sydney Morning Herald, Menteri Luar Negeri Indonesia Adam Malik mengatakan bahwa *"jumlah korban tewas berjumlah 50.000 orang atau mungkin 80.000"*.³⁰ Tak lama kemudian, kelompok pro-integrasi mendeklarasikan integrasi dengan Indonesia pada 30 November 1975 dan kemudian meminta dukungan Indonesia untuk mengambil alih Timor Timur dari kekuasaan FRETILIN yang berhaluan Komunis. Ketika pasukan Indonesia mendarat di Timor Timur pada tanggal 7 Desember 1975, FRETILIN didampingi dengan ribuan rakyat mengungsi ke daerah pegunungan untuk melawan tentara Indonesia. Lebih dari 200.000 orang dari penduduk ini kemudian mati di hutan karena pemboman dari udara oleh militer Indonesia serta ada yang mati karena penyakit dan kelaparan.

Operasi Seroja adalah bentuk invasi Indonesia ke Timor Timur yang dimulai pada tanggal 7 Desember 1975. Pada saat itu pihak Indonesia melakukan penyerbuan ke Timor Timur karena adanya desakan Amerika Serikat dan Australia yang menginginkan agar Fretilin yang berpaham komunisme tidak berkuasa di Timor Timur. Selain itu, serbuan Indonesia ke Timor Timur juga karena adanya kehendak dari sebagian rakyat Timor Timur yang ingin bersatu dengan Indonesia atas alasan etnik dan sejarah.

³⁰ Pernyataan Menteri Luar Negeri Indonesia Adam Malik dalam sebuah wawancara dengan Sydney Morning Herald mengenai jumlah korban tewas akibat invasi militer operasi seroja di Timor Timur.

Angkatan Darat Indonesia mulai melancarkan aksinya dan menyebrangi perbatasan dekat Atambua pada tanggal 17 Desember 1975 yang menandai awal dimulainya Operasi Seroja tersebut. Sebelumnya, pesawat-pesawat Angkatan Udara RI sudah kerap menghantui wilayah Timor Timur dan artileri Indonesia sudah sering diluncurkan di wilayah Timor Timur. Pada 27 Desember 1975, di Suai terjadi kontak langsung antara pasukan Infantri dengan Fretilin pertama kali. Pertempuran terdahsyat terjadi di Baucau pada 18-29 September 1976. Walaupun TNI telah berhasil memasuki Dili pada awal Februari 1976, namun banyak pertempuran-pertempuran kecil maupun besar yang terjadi di seluruh pelosok Timor Timur antara Fretilin melawan pasukan TNI.

Banyak juga yang mati di kota setelah menyerahkan diri ke tentara Indonesia, namun Tim Palang Merah International yang menangani orang-orang ini tidak mampu menyelamatkan semuanya. Selain terjadinya korban penduduk sipil di hutan, terjadi juga pembantaian oleh kelompok radikal FRETILIN di hutan terhadap kelompok yang lebih moderat. Sehingga banyak juga tokoh-tokoh FRETILIN yang dibunuh oleh sesama FRETILIN selama di Hutan. Berdasarkan cerita Francisco Xavier do Amaral, (selaku Presiden Pertama Timor Timur yang mendeklarasikan kemerdekaan Timor Timur pada tahun 1975).

Selain Xavier, ada juga komandan sektor FRETILIN bernama Aquiles yang dinyatakan hilang di hutan yang kemungkinan besar dibunuh oleh kelompok radikal FRETILIN. Berdasarkan menurut laporan resmi PBB, Selama perang saudara di Timor Timur dalam kurun waktu 3 bulan (September-November 1975) dan selama pendudukan Indonesia selama 24 tahun (1975-1999), lebih dari

200.000 orang dinyatakan meninggal dan 60.000 orang secara resmi mati di tangan FRETILIN.

Selebihnya mati ditangan Indonesia saat dan sesudah invasi dan adapula yang mati kelaparan atau penyakit. Hasil CAVR menyatakan 183.000 mati di tangan tentara Indonesia karena keracunan bahan kimia dari bom-bom napalm, serta mortir-mortir. Dalam pertempuran terakhir di Lospalos 1978, Fretilin mengalami kekalahan telak dan 3.000 pasukannya menyerah setelah dikepung oleh TNI sehari-hari. Operasi Seroja berakhir sepenuhnya pada tahun 1978 dengan hasil kekalahan Fretilin dan pengintegrasian Timor Timur ke dalam wilayah NKRI. Selama operasi ini berlangsung, arus pengungsian warga Timor Timur ke wilayah Indonesia mencapai angka 100.000 orang. Korban berjatuhan dari pihak militer dan sipil. Warga sipil banyak digunakan sebagai tameng hidup oleh Fretilin sehingga korban yang berjatuhan dari sipil pun cukup banyak. Pihak Indonesia juga dituding sering melakukan pembantaian pada anggota Fretilin yang tertangkap selama Operasi Seroja berlangsung.